PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Oleh: Andi Desmon, SH, MH.**

Abstrak

Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Daerah membentuk Peraturan daerah. Maka dari itu, dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah, maka DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, harus membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah.

Kata Kunci: Pengaturan, DPRD, Otonomi Daerah

A. Pendahuluan

Penelitian tentang pengaturan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar oleh DPRD dalam kerangka otonomi daerah, penting untuk dilakukan mengingat beberapa hal. *Pertama*, secara konstitusional, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah.² *Kedua*,

** Tenaga Pendidik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

¹ Penyebutan resmi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah dilakukan empat kali perubahan, sebagaimana dimuat dalam Republik Indonesia, *Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 11, Lembaran Negara Tahun 2006*; Republik Indonesia, *Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 12, Lembaran Negara Tahun 2006*; Republik Indonesia, *Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 13, Lembaran Negara Tahun 2006*; Republik Indonesia, *Perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 14, Lembaran Negara Tahun 2006*. selanjutnya dalam penulisan ini ditulis UUD 1945.

² Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan tidak secara tegas menyebut DPRD sebagai unsur susunan pemerintahan daerah. kehadiran DPRD, pertama dianggap sebagai konsekuensi daerah otonom seperti yang terdapat di negara-negara lain. Kedua, disimpulkan dari ketentuan Pasal 18 yang menyebutkan "... dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara ...". Dasar permusyawaratan tidak lain dari "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" sebagaimana disebut dalam Pembukaan. Dan prinsip ini dikuatkan dalam Penjelasan yang menyebutkan "Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan". Lihat Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 108-109.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,³ memberikan kewenangan kepada DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. *Ketiga*, pembentukan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar oleh DPRD merupakan kebutuhan mendesak daerah otonom yang harus dijadikan prioritas.

Secara umum, UU Pemda mengamanatkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, dan dalam pelaksanaannya DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut, mengajukan usul rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

B. Metode Pendekatan

Penelitian (*research*) ini merupakan penelitian hukum (*legal research*).⁴ Berdasarkan jenisnya, termasuk ke dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*).⁵ Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode deskriptif

³ Selanjutnya dalam penulisan ini ditulis UU Pemda.

⁴ Secara etimologi Penelitian atau *research* adalah upaya menemukan informasi kembali dengan cermat, hati-hati, tekun, telaten, dan sungguh-sungguh. Makna menemukan adalah kegiatan mencari sesuatu yang sebenarnya telah ada namun belum diformulasikan secara sistematis. Sedangkan secara konseptual penelitian diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan penyelidikan yang meliputi perencanaan, perancangan, manufacturing, pengamatan, analisis dan pengkajian secara sistematis dengan nalar yang logis serta mengikuti kaidah ilmiah, untuk mengungkap rahasia alam atau menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi manusia demi kesejahteraan umat manusia sendiri. Rangkaian kegiatan dimaksud, harus memfokus pada bidang kajian tertentu. Lihat Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2007, hlm 28

⁵ Metode penelitian hukum normatif bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan, yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi. Dunia *das sollen* itu adalah produk proses dialektikal antara *das sein* yang berinteraksi dengan dunia *das sollen* yang produknya diarahkan balik untuk mengatur dunia *das sein* yang telah memunculkannya. Artinya, dunia tempat berkiprahnya metode normatif ini adalah dunia *das sollen-sein*. Karena itu, untuk mencapai tujuannya, maka metode normatif itu harus mengakomodasikan cara kerja metode empirik ke dalam

analitis,⁶ sehingga akan diperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta keadaan ataupun fakta yang ada tentang arti pelaksanaan kewenangan pengaturan urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non- hukum,⁷ yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku teks ilmu hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum beserta pendapat para ahli hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.
- c. Bahan non-hukum, meliputi buku-buku teks ilmu politik, sosiologi, filsafat, jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*),⁸ yaitu pengumpulan bahan hukum dari berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang ada

kegiatan berkiprahnya. Lihat Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142-143.

⁶ Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha untuk melukiskan fakta-fakta dengan bahan-bahan hukum. lihat Soerjono Soekanto dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 14-15.

⁷ Untuk memecahkan isu hukum, diperlukan sumber-sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Di samping bahan hukum, dalam penelitian hukum juga dapat digunakan bahan-bahan non-hukum apabila diperluksespanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum dalam penelitian hukum hanya sebagai pelengkap belaka. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141-144

⁸ Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50.

kaitannya dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif,⁹ dengan menggunakan daya abstraksi dan interpretasi dengan merujuk pada kerangka pemikiran serta pandangan-pandangan para ahli yang ada relevansinya dengan topik penelitian, yang untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat perkalimat yang dirangkai dengan baik dan benar, pada gilirannya mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sepanjang peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, mengalami pasang naik dan pasang surut.¹¹ Walaupun demikian, politik hukum otonomi, tetap dipertahankan sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Bagir Manan, Pilihan otonomi sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah berlandaskan pada dasar permusyawaratan/perwakilan, dasar kesejahteraan sosial, dan dasar kebhinnekaan.¹²

Berkenaan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan apabila daerah mempunyai badan perwakilan rakyat yang oleh peraturan perundang-undangan disebut dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. DPRD sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan sekaligus sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

⁹ Analisis *kualitatif* digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan, artinya analisis *kualitatif* tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut. Lihat Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 54

¹⁰ Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Adikarya, Yogyakarta, 2003, hlm. 4-5.

¹¹ lihat Otong Rosadi, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, hlm 541-561.

¹² lihat Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*. Dalam Martin H. Hutabarat, et.all (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 145-146.

Penggantian UU Pemda pada tahun 2014, membawa angin perubahan tentang pola pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Jika menurut ketentuan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah diklasifikasikan atas urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pusat dan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Sekarang, berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Pemda, klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terkait dengan urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta

kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Sementara itu, terkait dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan UU Pemda tersebut, terlihat dengan jelas bahwa dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah. Maka dari itu, pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa tanpa adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, maka tidak ada otonomi daerah.

Selanjutnya dalam 236 UU Pemda disebutkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Maka dari itu, dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah, maka Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, harus membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah. Artinya, peraturan daerah yang dibuat hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Menurut Bagir Manan Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kewenangan Pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintahan daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.¹³

Terkait dengan keberadaan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka DPRD secara kelembagaan harus memprioritaskan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) untuk membentuk perda urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, sehingga urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan semangat dan spirit otonomi.

Hakikat otonomi menurut Bagir Manan merupakan kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka, maka dengan terbentuknya perda urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah dimaksud secara mandiri, sehingga tujuan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dapat terealisasi.

D. Penutup

Melalui bagian penutup ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan pengaturan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar oleh DPRD dalam kerangka otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan keharusan. Pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah tentang urusan wajib pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang terdiri dari peraturan daerah

¹³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 59-60.

urusan pendidikan, peraturan daerah urusan kesehatan, peraturan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, peraturan daerah urusan perumahan dan kawasan pemukiman, peraturan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan peraturan daerah urusan sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2007.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Adikarya, Yogyakarta, 2003.
- Martin H. Hutabarat, et.all (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

B. Jurnal Ilmiah

- Otong Rosadi, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.